

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan pertumbuhan penduduk di seluruh negara di dunia hal ini terbukti dengan jumlah populasi penduduk di dunia mencapai 7.684.292.383 jiwa pada tahun 2020, Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia dengan penduduk 279 Juta jiwa dengan kepadatan penduduk yang masuk dalam lima besar negara terpadat di dunia kepadatan penduduk akan selalu bersinggungan dengan permasalahan lingkungan yang sangat kontras dengan alih fungsi lahan hutan menjadi perumahan dan lain sebagainya, masalah sampah masih sangat disoroti oleh pemerintah.

Indonesia sedang dihadapkan dengan permasalahan sampah masalah sampah yang muncul itu disebabkan oleh adanya jumlah sampah yang meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya. Selain pertumbuhan penduduk yang signifikan ada juga faktor lainnya yang menyebabkan adanya permasalahan sampah, kurangnya pemahaman tentang dampak yang timbul akibat tidak adanya pengelolaan sampah yang efisien dan penanganan sampah dari segala aspek

Sampah adalah salah satu sumber masalah utama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bencana yang terjadi di masyarakat seperti banjir sering terjadi karena adanya timbunan sampah yang ada di sungai-sungai sehingga menyebabkan tersumbatnya sungai dan menjadi pendangkalan sungai hal ini biasanya diakibatkan oleh masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungannya tetap membuang

sampah di jalan sampai sungai-sungai. Dari bencana banjir, pemerintah dapat beradaptasi dan belajar sehingga dapat menanggulangi bencana tersebut.

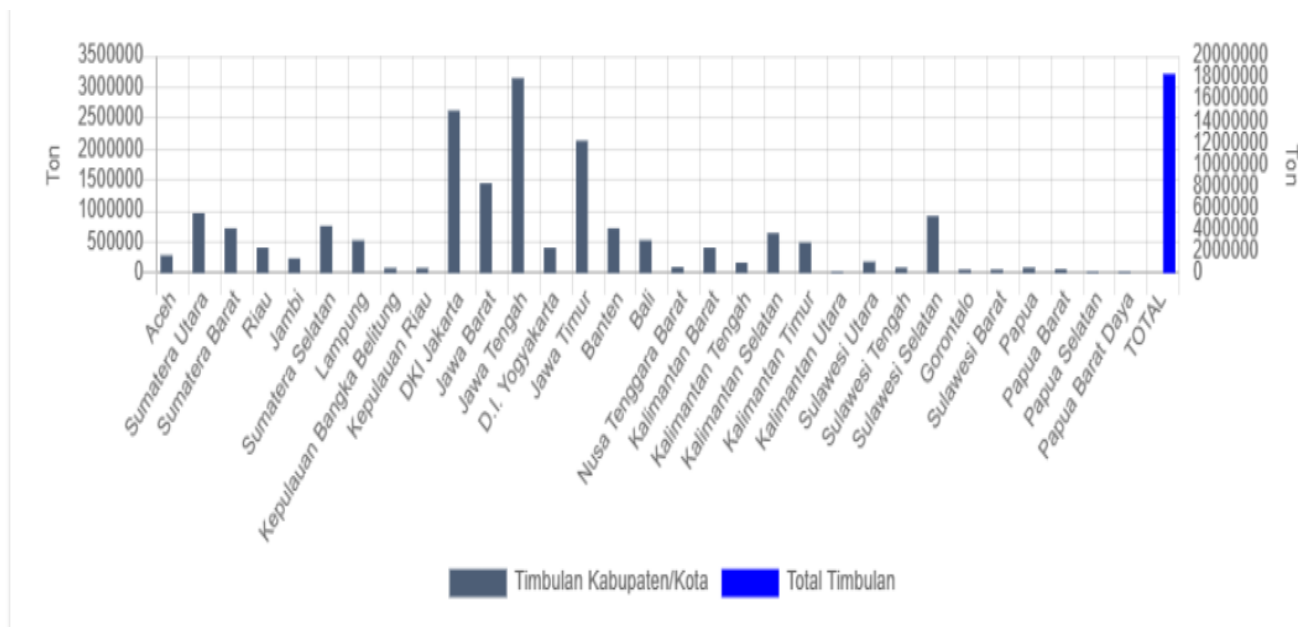
Masyarakat Indonesia sering membuang sampah tanpa memilih terlebih dahulu, padahal banyak jenis sampah yang dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali agar dapat mengurangi timbunan sampah dalam hal ekonomis juga terlihat ketika masyarakat dapat mengolah sampah kembali dengan baik maka itu dapat diperjualbelikan maka masyarakat juga mendapatkan penghasilan tambahan. Pemerintah daerah mendapat peran penting tentang sampah yaitu mengatur tentang sampah rumah tangga, tentang daur ulang sampah bahkan mengatur tentang tata cara membuang sampah dengan benar.

Sampah rumah tangga yang saat ini menjadi salah satu aspek yang paling utama dalam permasalahan ini mencapai 38,3% timbunan sampah berasal dari sampah rumah tangga dengan komposisi sampah berdasarkan jenisnya adalah sampah sisa makanan, hal ini sudah menjadi masalah nasional dan bahkan dunia sampah saat ini bukan lagi ancaman potensial, sampah sekarang sudah menjadi bencana aktual dan menjadi fokus tersendiri sejak sepuluh tahun terakhir ini. Pengelolaan sampah saat ini belum sesuai dengan metode pengolahan sampah yang ramah lingkungan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Dampak seperti ini yang dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak mendapat perhatian khusus oleh semua pihak baik pemerintah maupun swasta serta masyarakat.

Masyarakat terbiasa dengan menggunakan cara sederhana yaitu dengan membakar atau mengumpulkan sampah kemudian membuang sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA). Penanganan sampah secara sederhana tidak dapat menangani masalah sampah yang sedang terjadi, akan tetapi dapat menimbulkan masalah baru yaitu dapat mencemari lingkungan sekitar dan dapat mencemari udara yang timbul dari bau sampah yang tidak sedap.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023 mengemukakan bahwa timbunan sampah di Indonesia mencapai 18,081,278.88 ton per tahun dengan jumlah penduduk 278,8 juta jiwa, berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa setiap provinsi menghasilkan sampah, Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 1.1 Timbunan Sampah



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan sampah Nasional (2022)

Gambar tersebut menjelaskan dengan semakin banyaknya produksi sampah setiap provinsi pada tahun 2022 yang sangat membludak di setiap provinsi, maka

pemerintah pusat harus mengeluarkan kebijakan yang tegas tentang sampah rumah tangga yang sering menjadi masalah utama di setiap provinsinya. Pulau Jawa menjadi salah satu fokus yang utama karena di pulau Jawa terdapat banyak sekali permasalahan sampah di pulau Jawa. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa jumlah paling tinggi timbunan sampah di Pulau Jawa.

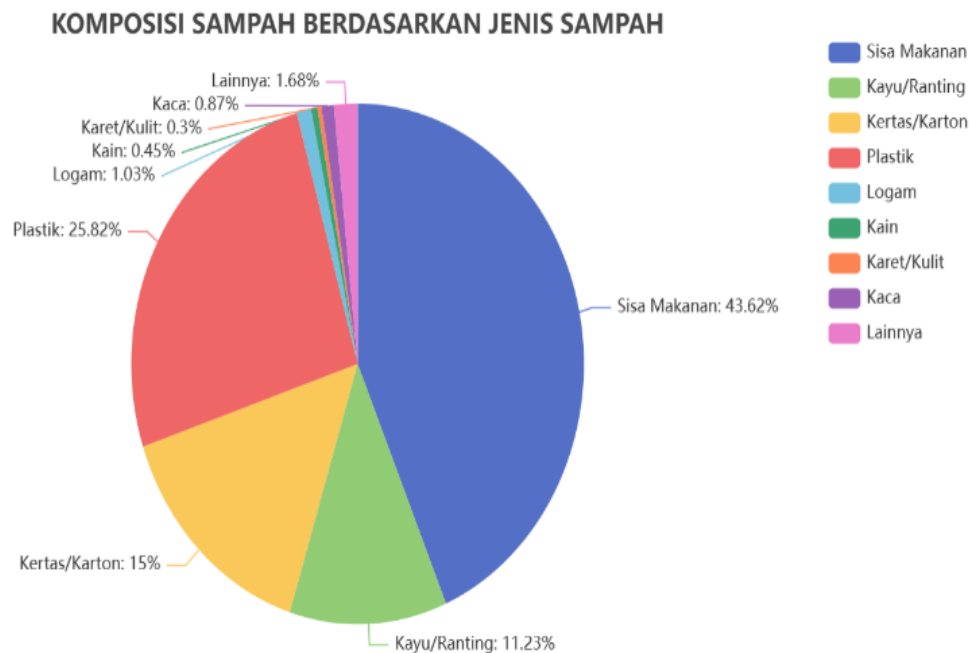
Peraturan pemerintah pusat sudah menetapkan peraturan pengolahan sampah rumah tangga dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan sampah rumah dan Sejenis sampah rumah tangga (Jakstranas). Kebijakan ini diharapkan menjadi alternatif terbaru dalam pengelolaan sampah nasional dan melibatkan seluruh lapisan pemerintah maupun masyarakat. Di dalam Undang-Undang juga telah ditetapkan tentang pengolahan sampah rumah tangga tertera pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 pada Undang-Undang ini dijelaskan bahwa sampah adalah salah satu masalah nasional sehingga penanganannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar manfaat dari beberapa aspek baik dari ekonomi, kesehatan, lingkungan dan dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah.

Sistem Informasi Pengelolaan sampah Nasional (2022) bahwa timbunan sampah masih banyak yang belum terolah dengan baik penanganan yang masih kurang membuat timbunan sampah semakin membludak dan semakin menumpuk, kurangnya kebijakan dan keefektifan dalam pengolahan sampah di Indonesia menjadi masalah utama pada saat ini, dapat dilihat bahwa penanganan sampah di pulau Jawa masih menjadi terburuk dari pulau yang lain. Dengan begitu pulau Jawa

yang memiliki penduduk terpadat dari pulau yang lain harus mengejar ketertinggalan tentang permasalahan sampah saat ini karena jika tidak maka pulau Jawa dapat dikatakan pulau dengan timbunan sampah paling banyak di Indonesia.

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu tempat yang menjadi tujuan bagi pengunjung dan turis guna berlibur untuk melepas penat, Provinsi ini menjadi salah satu provinsi dengan kunjungan wisatawan terbanyak di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023. Maka dari itu potensi lonjakan sampah sangat berpengaruh karena banyaknya wisatawan dan pendatang ke provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 1.2 Komposisi sampah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan sampah Nasional (2022)

Data di atas dapat dilihat bahwa sampah sisa makanan menjadi sampah yang paling dominan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai angka 41,62% komposisi sampah di provinsi ini adalah sampah sisa makanan harus adanya perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat sekitar untuk sampah sisa makanan ini tentang teknik pengolahannya dan sistem pembuangan, sampah sisa makanan ini juga sering ditemukan di warung makan dan tempat makan mewah, kegiatan rumah tangga juga ikut berperan serta dalam penyumbangan sampah sisa makanan, Selain sampah makanan ada beberapa jenis sampah dalam timbunan sampah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ikut serta dalam penanganan manajemen pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Sekretariat Bersama Yogyakarta, Sleman, dan Bantul (Sekber Kartamantul) adalah satuan kerja yang bertugas mengawasi pengelolaan sampah tingkat provinsi untuk bekerja sama dengan BLH di kabupaten/kota. Pengawasan yang dilakukan mulai dengan penarikan retribusi, pengambilan dari sumber untuk dibawa ke TPS sampah, pengangkutan sampah TPA sampah piyungan oleh puluhan truk pengangkut sampah atau kendaraan pengangkut sampah yang lain yang beroperasi di tiga daerah (Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul) sampai pengoprasian TPA Piyungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen sampah terpadu yang memungkinkan rawan konflik, karena perbedaan kepentingan dalam otonomi daerah. Pada permasalahan yang lain adanya campur tangan pemerintah provinsi ternyata tidak begitu saja dapat menyelesaikan banyaknya masalah sampah yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta adalah salah satu Kota yang memiliki jumlah penduduk yang padat, Dengan luas wilayah 32,5 km² tidak hanya sebagai kota administrasi dan sebagai pusat politik, Kota Yogyakarta juga berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi, jasa pelayanan, sosial budaya dan jasa pelayanan, banyak sekali masyarakat yang bermigrasi untuk pindah ke Kota Yogyakarta salah satunya untuk menuntut ilmu, memiliki sebutan lain yaitu Kota Pendidikan, kota ini menjadi salah satu tujuan pelajar guna melanjutkan pendidikannya di jenjang bangku perkuliahan dengan adanya universitas ternama di dalamnya menjadikan salah satu alasan mahasiswa memilih kota Yogyakarta untuk menuntut ilmu.

Peningkatan kunjungan wisatawan menjadi salah satu faktor utama tingginya timbunan sampah di Kota Yogyakarta Berdasarkan survei yang masuk pada tahun 2022 jumlah kunjungan pariwisata di Kota Yogyakarta mencapai 5,1 Juta orang per tahun, data tersebut melebihi target wisatawan Dinas Pariwisata yang hanya mencapai 2 Juta orang per tahun. ([Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta - Jumlah Kunjungan Wisatawan Yogya Lampaui Target, Capai 5,1 Juta](#) di akses pada hari Jumat 14 Oktober 2022)

Masyarakat migrasi pertumbuhan penduduk yang tinggi juga menjadi salah satu faktor tingginya kebutuhan hidup masyarakat kota Yogyakarta. Dengan persentase 70,04% penduduk usia produktif (Analisis Statistik BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021), dengan tingginya angka usia produktif memiliki dampak dapat meningkatkan angka kebutuhan juga semakin tinggi, dengan angka kebutuhan yang semakin tinggi maka timbunan sampah di Kota Yogyakarta juga semakin tinggi.

Potensi timbunan sampah per harinya mencapai 303,13 ton sedangkan sampah yang masuk dalam pertahunnya mencapai 110,642.60 ton pada tahun 2022 dengan ini dapat dilihat bahwa masih banyak timbunan sampah yang ada di Kota Yogyakarta yang butuh perhatian khusus, sedang itu TPA yang menampung sampah di Kota Yogyakarta sudah tidak dapat lagi menerima sumbangan sampah dari Kota Yogyakarta.

Tabel 1.3 Permasalahan sampah di Kota Yogyakarta

No	Permasalahan	Solusi	Sumber / Bukti
1.	TPA piyungan yang yang sudah tidak mampu lagi menampung sampah	Adanya pelebaran atau Optimalisasi perluasan TPA piyungan.	Tirto.id Februari 2023
2.	Kurangnya Literasi Lingkungan masyarakat dalam program pengurangan limbah rumah tangga	Adanya pendampingan khusus untuk dapat membantu masyarakat dalam program mengurangi limbah sampah rumah tangga dengan cara daur ulang.	Harian Jogja Kamis, 31 Agustus 2023
3.	Pencemaran Air Sungai	Harus dibentuknya peraturan tegas tentang dilarangnya membuang segala jenis limbah di sungai termasuk sampah rumah tangga	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022
4.	Masih terdapat masyarakat yang belum melaksanakan 3R dalam pengelolaan sampah rumah tangga	Adanya Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat.	Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020
5.	Bank sampah yang masih belum aktif	Adanya pendampingan terhadap pengelolaan sampah di bank sampah atau motivasi terhadap bank sampah	Dokumen Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023

Sumber : Dokumen pribadi (2024)

Permasalahan-permasalahan di atas pengelolaan sampah pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat sekitar agar terjalinnya keselarasan partisipasi dalam mengurangi timbulan sampah dan dapat membantu penurunan angka timbunan sampah yang ada di pulau Jawa. Dengan cara bank sampah yang dapat di setiap dusun atau RW di seluruh pulau Jawa akan dapat mengantisipasi tentang masalah sampah yang menimbun. Pola dan perilaku masyarakat juga berpengaruh terhadap timbunan sampah, perilaku merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan setiap kegiatan pengolahan sampah

Tabel 1.4 Fasilitas pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta

No	Nama Fasilitas	Jumlah Fasilitas
1	Jumlah TPS	61
2	Bank Sampah	665
3	TPA	1
	Jumlah :	727

Sumber: Dokumen pribadi 2023

Data di atas dapat dilihat bahwa jumlah TPA yang sangat tidak memadai dengan adanya satu TPA untuk 61 TPS yang tersebar di Kota Yogyakarta, TPA ini tidak hanya menampung sampah dari satu kota, TPA ini menampung ada 3 kabupaten/kota yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman bagian selatan dan Kabupaten Bantul dikarenakan kurangnya lahan untuk membangun TPA masing-masing Kabupaten/Kota menjadikan TPA Piyungan menjadi satu-satunya TPA yang digunakan. (Kasam, 2011) maka dari itu peran bank sampah sangat penting guna mengurangi penumpukan sampah di kota Yogyakarta yang diakibatkan oleh tingginya penumpukan sampah dan kurangnya daya tampung TPA Piyungan.

Tabel 1.5 Data sampah masuk ke TPA Piyungan

Tahun	P	Provinsi	Kab/Kota	Nama Fasilitas	Jenis	Status	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah masuk Landfill (ton/thn)
2022	2	D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	TPST Piyungan	TPA Regional	A	97,086.35	92,134.39
2021	2	D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	TPST Piyungan (Regional)	TPA Regional	A	91,119.74	86,471.39

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (2022)

Data di atas menunjukkan bahwa sampah masuk ke TPA Piyungan dari kota Yogyakarta lebih dari 90 juta ton per tahunnya, walau sudah mengalami pengurangan dalam timbunan sampah yang masuk ke TPA Piyungan seperti yang kita tahu bahwa TPA piyungan sudah melebihi ambang batas dimana TPA Piyungan sudah beroperasi mulai tahun 1996 dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pada tahun 2000 dikelola oleh Sekretariat Bersama (Sekber). pada tahun 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan revitalisasi untuk menambah kapasitas 438.000 ton sampah atau setara untuk kapasitas pengelolaan 2 tahun ke depan atau sampai 2022 ([TPA Piyungan, Muara Sampah Yogyakarta: Sejarah, Kapasitas, dan Permasalahannya Halaman all - Kompas.com](#), diakses pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 19.25)

Program bank sampah adalah salah satu langkah awal untuk membina kesadaran masyarakat untuk memilah, mendaur ulang dan memanfaatkan sampah karena sampah mempunyai nilai jual yang cukup baik, sehingga mengolah sampah yang berwawasan lingkungan dan kreativitas dari warga tersebut membuat nilai jual tersendiri dari sampah yang sudah dipilah, dengan mengubah pemikiran warga yang didasarkan dengan paradigma “kumpul-angkut-buang” menjadi pengelolaan

sampah yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Perlunya dibentuk bank sampah agar warga masyarakat dapat mengetahui tentang bank sampah dan menambah pengetahuannya tentang pengolahan sampah dan menambah pengetahuan tentang bank sampah bahwa sampah itu dapat ditimbang dan dapat didaur ulang kembali sehingga dapat menghasilkan nilai yang ekonomis. Bank sampah juga membantu meminimalkan risiko pencemaran lingkungan karena jumlah sampah yang lambat laun berkurang, bank sampah juga membantu dalam mengantisipasi risiko banjir akibat sampah yang menyumbat saluran air dan sungai (Bachtiar et al., 2015)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah disana tertera bahwa terdapat beberapa model yang digunakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga salah satunya adalah Sampah rumah tangga di pilah atau dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu organik, kertas, kaca, dan plastik, pengumpulan sampah, dan pengelolaan sampah.

Kolaborasi antar warga masyarakat dengan pemerintah harus terjalin secara harmonis dengan ketegasan pemerintah dalam menyikapi sampah rumah tangga dengan menegakkan peraturan, pemberian sanksi, menyediakan sarana dan prasarana pembuangan sampah dan adanya sarana dan prasarana untuk pengolahan sampah di setiap Bank sampah. Secara teknik instansi yang bertanggung jawab atas mengimplementasikan kebijakan tentang pengolahan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup maka dari itu DLH perlu melakukan langkah untuk memecahkan permasalahan kebijakan sampah di setiap daerah agar adanya

pemerataan pengolahan sampah di setiap daerah dan berkurangnya penimbunan sampah.(Putra et al., 2019)

Kolaborasi dari *stakeholders* yang diharapkan dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang ada pada Kota Yogyakarta adalah kolaborasi dalam melakukan sosialisasi, pertukaran informasi, penyediaan fasilitas untuk masyarakat dalam mengolah sampah dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga pada Kota Yogyakarta. Hal ini bertujuan agar mempermudah dan mempercepat dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah. Permasalahan sampah merupakan, masalah bersama yang harus diselesaikan dengan cara bersama juga, dan jika sampah dikelola dengan baik maka akan dapat menghasilkan nilai ekonomis dan juga dapat menjadikan lingkungan hidup yang bersih dan nyaman bagi masyarakat. Kolaborasi merupakan suatu kerjasama yang dilakukan antar organisasi atau pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang tidak mungkin atau sulit dicapai apabila dilakukan secara individual atau mandiri. (Dayana, 2021)

Tabel 1.6 Potensi Timbunan Sampah di Kota Yogyakarta
DATA POTENSI TIMBULAN SAMPAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	POTENSI TIMBULAN SAMPAH (TON/HARI)	POTENSI TIMBULAN SAMPAH (TON/TAHUN)
1	Mantrijeron	33.664	26,93	9.829,89
2	Kraton	18.024	14,42	5.263,01
3	Mergangsan	28.869	23,10	8.429,75
4	Umbulharjo	68.479	54,78	19.995,87
5	Kotagede	33.557	26,85	9.798,64
6	Gondokusuman	37.088	29,67	10.829,70
7	Danurejan	18.851	15,08	5.504,49
8	Pakualaman	9.189	7,35	2.683,19
9	Gondomanan	12.851	10,28	3.752,49
10	Ngampilan	15.428	12,34	4.504,98
11	Wirobrajan	24.851	19,88	7.256,49
12	Gedongtengen	16.559	13,25	4.835,23
13	Jetis	23.491	18,79	6.859,37
14	Tegalrejo	34.798	27,84	10.161,02
TOTAL		375.699	300,56	109.704,11

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (2023)

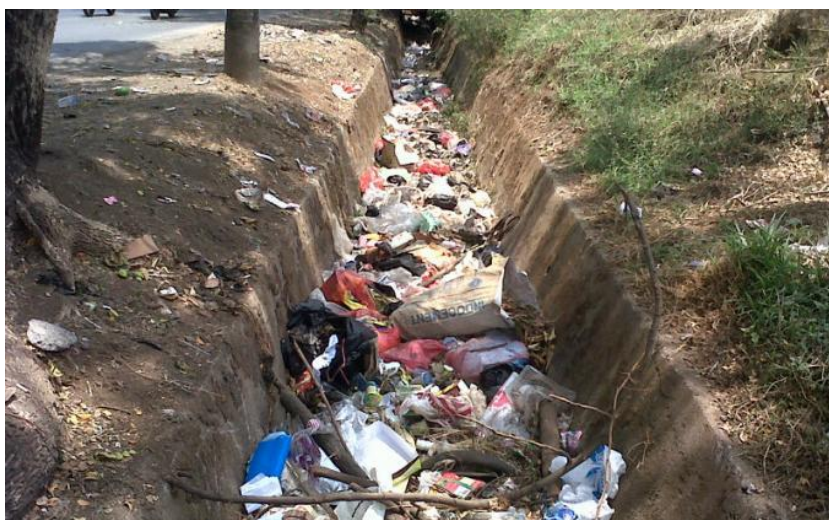
Data di atas dapat kita lihat bahwa kecamatan Umbulharjo dengan potensi timbunan sampah per tahunnya adalah 19,995,87 Ton/Tahun, timbunan yang tinggi dipengaruhi oleh tingginya aktivitas produktif di kecamatan Umbulharjo dan angka timbunan tertinggi terdapat pada kecamatan Gondokusuman yang mencapai angka 10.829,70 Ton Per Tahun. Masih di urutan ke 3 ada Kecamatan Tegalrejo yang mencapai angka 10.161,02 Ton Per Tahun, dengan angka persentase yang tinggi mencapai angka 70,04% angka produktif sehingga menimbulkan tingginya angka timbunan sampah sehingga membutuhkan pengelolaan sampah yang baik dan memadai. Dari kalangan masyarakat maupun peran dalam pengelolaan sampah di sektor pemerintahan. Perhatian khusus ini dapat ditunjang dengan adanya kebijakan Peraturan Daerah No 10 tahun 2012 tentang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah.



Gambar 1.3 Kondisi TPS di Terban, Gondokusuman, Yogyakarta.

Sumber : Ananda Ridho/TEMPO. Rabu, 11 Oktober 2023 ([Jogja Darurat Sampah: Begini Kata Warga, Begitu Kata Staf Dinas Lingkungan Hidup - Nasional Tempo.co](#))

Gambar di atas dapat dilihat bahwa banyaknya penumpukan sampah di TPS yang diakibatkan pembatasan pembuangan sampah ke TPA dengan sampah maksimal 100 ton perhari dengan kapasitas itu maka TPS menjadi salah satu sarana penumpukan sampah yang digunakan oleh masyarakat untuk menampung sementara sampah sebelum diangkut ke TPA piyungan dan kurangnya pengelolaan sampah Kota Yogyakarta, gunung sampah tersebut menimbulkan bau yang kurang sedap. Dan jika dibiarkan semakin lama akan menjadi sarang nyamuk atau bisa menjadi sarang penyakit lainnya. Selain itu kedaratan masyarakat masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai dan diselokan dilihat dari gambar di bawah ini.



Gambar 1.4 Kondisi Sampah Selokan di Kecamatan Gondokusuman

Dalam pelaksanaan program bank sampah di Kota Yogyakarta khususnya di Kecamatan Gondokusuman, pengelola bank sampah harus mampu mengkoordinir nasabah bank sampah guna melakukan pemilahan sampah di setiap rumah masing-masing, hal ini untuk mempermudah pengelola sampah untuk dapat mengelompokkan jenis sampah. Proses pemilahan sampah dari sumbernya guna untuk meningkatkan pengelolaan sampah pada bank sampah (Haryanti et al., 2020)

Tabel 1.7 Jumlah Bank Sampah

No	Kecamatan	Jumlah Bank Sampah Aktif	Jumlah Bank Sampah Tidak Aktif
1.	Tegalrejo	24	4
2.	Gondokusuman	39	8
3.	Wirobrajan	20	2
4.	Gedongtengen	16	5
5.	Mantrijeron	43	3
6.	Kraton	22	4
7.	Mergangsan	43	2
8.	Danurejo	40	0
9.	Gondomanan	13	0
10.	Jetis	36	0
11.	Kota Gede	40	0
12.	Ngampilan	13	0
13.	Pangkualaman	19	0

No	Kecamatan	Jumlah Bank Sampah Aktif	Jumlah Bank Sampah Tidak Aktif
14.	Umbulharjo	83	0
	Jumlah :	479	28

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun (2023)

Dapat dilihat pada data di atas bahwasannya Kecamatan Gondokusuman memiliki jumlah bank sampah tidak aktif dan tingginya timbunan sampah pada kecamatan Gondokusuman sebesar 10.829,70 ton/tahun menjadi satu titik fokus yang harus menjadi pusat perhatian guna penanganan dan pemaksimalan pengelolaan sampah di Kecamatan Gondokusuman. Di Kecamatan Gondokusman dapat dilihat pada bank sampah Resik 06 di Kelurahan Terban dan bank sampah Mawar di Kelurahan Baciroy hal ini dapat dilihat dari perbedaan tingkat efektifitas bank sampah dari kedua bank sampah tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan sampah.

Tidak hanya di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta saja yang memiliki masalah pengelolaan sampah yang kurang ada pula beberapa daerah yang memiliki tingkat pengelolaan sampah yang masih rendah dapat kita lihat bahwa pada penelitian pemberdayaan pengelolaan sampah yang disampaikan oleh Rita Widyasari di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo menjelaskan tentang upaya pengoptimalan pengelolaan sampah diperlukan partisipasi dari semua pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat dan kesadaran masyarakat itu faktor yang paling penting. (Widyasari & Rohani, 2020)

Selain Kabupaten Kulon Progo terdapat pula kota binjai yang memiliki permasalahan yang sama tentang pengelolaan sampah dan penumpukan sampah.

Pada dasarnya tidak hanya di Kota Yogyakarta, kota-kota yang lain seperti Semarang, Kulon Progo dan Binjai harus bisa meniru kebijakan Kabupaten Banyumas dimana sektor pengelolaan sampah sudah baik sehingga menjadi kabupaten Pertama dengan Zero Waste.

(Nuzulina Wahyutin 29 Oktober 2023 04.37 WIB [Kabar Baik Indonesia: Banyumas, Kabupaten Pertama dengan ZERO WASTE \(goodnewsfromindonesia.id\)](https://www.goodnewsfromindonesia.id))

Penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa kebijakan dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta kurang terealisasi dengan baik masih tingginya angka kesadaran masyarakat tentang sampah dan pengelolaan pengelolaan sampah yang kurang mengakibatkan penumpukan sampah yang tidak bisa dikondisikan baik pada penumpukan di TPA maupun TPS di Kota Yogyakarta sendiri, harus adanya kesadaran dari masyarakat, pemerintah kelurahan, pemerintah daerah guna menangani masalah yang cukup serius guna mengatasi permasalahan sampah. akan menimbulkan potensi-potensi serius seperti mengganggu kesehatan, kelestarian alam dan masih banyak lagi. Maka dari itu peneliti tertarik untuk dapat meneliti penanganan sampah pada pasal 15 sebagai salah satu pasal implementasi kebijakan Perda Nomor 10 tahun 2012, untuk itu peneliti tertarik mengambil judul “Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga Oleh Bank Sampah Di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta” pertanyaan penelitian ini adalah “implementasi kebijakan penanganan sampah Oleh Bank Sampah di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta belum berjalan dengan efektif ?”

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Tingginya timbunan sampah di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga oleh bank sampah di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta yang dipelopori banyaknya bank sampah tidak aktif.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penanganan sampah rumah tangga oleh bank sampah di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta?
2. Apa saja faktor apa saja yang menghambat penanganan sampah oleh bank sampah di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu keinginan yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis penanganan sampah rumah tangga oleh bank sampah di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.
2. Menganalisis faktor yang menghambat penanganan sampah oleh bank sampah di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yaitu :

1. Secara Akademik : sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga
2. Secara Praktis : Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mendorong pemerintah kota guna mengkaji ulang segala peraturan dan kebijakan tentang pengelolaan sampah Kota Yogyakarta sehingga menghasilkan kajian yang dapat memberikan manfaat kepada pihak yang peduli terhadap berbagai pengelolaan sampah yang sedang berkembang saat ini.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.7 Penelitian Terdahulu

No	Judul/Penelitian dan Tahun	Metode / Teori	Tujuan	Hasil
1.	Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta Dan Kebijakan Penanggulangannya (Umayana & Cahyati, 2015)	Deskriptif kualitatif/ menggunakan teori Galileo (2012) implementasi kebijakan dilihat pada pengelolaan sampah pada pengendalian bangkitan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan sampah dan upaya penanganan di Kota Yogyakarta	Dapat dilihat bahwa permasalahan sampah di Kota Yogyakarta terkait dengan masalah jangkauan pelayanan, dampak dari perilaku pembuangan sampah yang tidak baik, dan masalah teknis pengelolaan sampah di TPA Piyungan Peningkatan penduduk, migrasi, dan perkembangan industri di suatu daerah meningkatkan produksi sampah.
2.		Kualitatif/teori		

No	Judul/Penelitian dan Tahun	Metode / Teori	Tujuan	Hasil
	ANALISIS PENERAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Nusantara dkk., 2023)	yang digunakan adalah George Edward III (1980) : Terdapat empat faktor yang berperan dalam pencapaian keberhasilan Implementasi kebijakan, yaitu faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi	studi ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada wilayah pariwisata Pantai Jakat	Hasil dari studi menunjukkan bahwa penerapan kebijakan perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang pengelolaan sampah di wilayah pariwisata pantai Jakat Kota Bengkulu Belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan Perda diterbitkan. Terkonfirmasi belum ada program pengurangan dan penanganan sampah dengan baik. hasil observasi mendalam selama penelitian yang dilakukan, sampah telah menjadi fenomena alam yang ada di Pantai Tapak Paderi
3.	<i>Community Empowerment Through Plastic Waste Recycling Activities into Ecobrick</i> (Yuyun Andinar dkk., 2023)	Kualitatif George Edward III (1980): 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.	Tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang cara mengolah plastik Limbah dengan ecobricks. dan bagaimana dampaknya ecobrick pada masyarakat sekitar.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada enam tahapan dalam memberdayakan ecobrick (1) memberikan pelatihan tentang ecobrick, (2) mengumpulkan sampah plastik, (3) memilah sampah plastik, (4) melakukan ecobricks, (5) Menimbang ecobrick, (6) meletakkan bersama-sama ecobrick
4.	<i>Creating Green Circular Economy in Waste Management: The Kampung Hijau Bank</i>	Kualitatif Suryani, (2014) : lima aspek implementasi yang saling berhubungan erat: kelembagaan, teknik produksi, regulasi, keterlibatan	<i>This research has found that, firstly, the CSR program of Al-Haqiqi Waste Bank adopts a new paradigm for waste management and helps change community habits in managing household</i>	<i>This study reveals that 1) The CSR program of Al-Haqiqi Waste Bank adopts a new paradigm for waste management and assists in changing community habits regarding household waste management 2) Kampung</i>

No	Judul/Penelitian dan Tahun	Metode / Teori	Tujuan	Hasil
	<i>Sampah Al-Haqiqi Case (Hidayatullah & Fadhliana, t.t.)</i>	masyarakat, dan operasional	<i>waste, particularly by employing the concept of circular economy, thus fostering a shift in community thinking, extending beyond the traditional 3R (reduce, reuse, recycle) to the 9R (refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, and recover).</i>	<i>Hijau Bank Sampah Al-Haqiqi program encourages the emergence of the circular economy, leading to not only environmental sustainability but also economic improvement 3) Kampung Hijau Bank Sampah Al-Haqiqi program accelerates the achievement of development goals, particularly focusing on SDG Goal 12 and the reduction of GHG emissions, amounting to 893 kg of CH₄ and 17,860 kg of CO</i>
5.	Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Binjai (Manalu dkk., 2022)	Kualitatif George Edward III (1980): 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.	mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Binjai	Pada studi ini ditemukan hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Binjai antara lain tidak adanya peraturan daerah yang spesifik mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan berakibat pada ketersediaan anggaran. Dukungan pimpinan yang kurang untuk menjadikan program ini sebagai program prioritas menjadi kendala lainnya

No	Judul/Penelitian dan Tahun	Metode / Teori	Tujuan	Hasil
6.	Implementasi perda nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah studi kasus pengelolaan sampah kota semarang (Pendidikan & Konseling, t.t.)	Kualitatif George Edward III 1980 dimana meliputi 4 fokus : struktur Birokrasi, Disposisi, Komunikasi, dan Sumber daya.	mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Semarang dan mengetahui faktor faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang menurut PERDA Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.	tahap implementasi kebijakan dalam mengelola sampah di Kota Semarang telah dilaksanakan dengan hambatan yang tidak terlalu sulit, yakni aktivitas dalam mengumpulkan dan proses akhir.
7.	Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah kabupaten lebak nomor 4 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah (Saadeh dkk., 2019)	Kualitatif Edward III (1980) di mana meliputi 4 fokus : struktur Birokrasi, Disposisi, Komunikasi, dan Sumber daya.	mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah dimaksud	Kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi dan pembinaan oleh dinas lingkungan hidup kepada desa – desa di kabupaten lebak, sehingga dampaknya desa tidak serius menunaikan instruksi
8.		Kualitatif		

No	Judul/Penelitian dan Tahun	Metode / Teori	Tujuan	Hasil
	Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di desa margagiri kecamatan Bojonegara kabupaten serang (Novaldi dkk., 2023)	teori Jan Merse (2015) menjelaskan implementasi kebijakan : Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat, dan Pemanfaatan Potensi.	mengetahui bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam menerapkan kebijakan pengelolaan sampah dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Margagiri.	penelitian tentang pengelolaan sampah di Desa Margagiri belum maksimal. Masih ada hambatan dari pemerintah Desa Margagiri. Hambatan dari masyarakat adalah kurangnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah
9.	Implementasi peraturan daerah kabupaten bungo nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di kelurahan tanjung gedang kecamatan pasar muara bungo (Ataka Rama Reta.,2020)	Kualitatif/ menggunakan teori dari Thomas R. Dye dan Budi Winarno (1995). Pada implementasi bertujuan untuk mengatur, mengelola, atau mengurangi sampah	untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah di Kelurahan Tanjung Gedang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah dua belas orang yang ditentukan dengan teknik purposive sampling dan accidental sampling.	Hasil penelitian ini mencatat bahwa implementasi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tanjung Gedang belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, terlihat dari pelaksanaan hak, kewajiban, larangan, pengelolaan sampah, dan sanksi yang belum diterapkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
10.		Kualitatif/	keseluruhan dari	

No	Judul/Penelitian dan Tahun	Metode / Teori	Tujuan	Hasil
	<i>Public-private partnership in solid waste bank of Palestine (Saadeh dkk., 2019)</i>	Kattoua (2019 dan Schlueter (2017): implementasi merupakan: pengumpulan, transportasi, penyortiran, perawatan, daur ulang, pembuangan dan, tentu saja, pemantauan	Penelitian yang disajikan dalam makalah ini adalah untuk mempelajari status lapangan SWM di Tepi Barat Palestina di bawah perspektif potensi keterlibatan sektor swasta. Untuk tujuan ini, dua belas Dewan Layanan Bersama (JSC) untuk pengelolaan limbah padat diselidiki.	hanya dua yang saat ini memiliki Publik-Kontrak Kemitraan Swasta (KPBU) untuk manajemen dan pengoperasian stasiun transfer dan sanitasi Tpa. Di sisi lain, dua JSC saat ini membuat pengaturan dan melaksanakan studi untuk KPBU di masa depan tentang pengelolaan limbah menjadi energi, biowaste dan proyek daur ulang. Jenis dan Tugas Pelayanan Bersama Dewan (JSC) memiliki kontrak KPBU berdurasi 3 bulan untuk
11.	<i>Developing efficient circularity for construction and demolition waste management in fast emerging economies: lessons learned from Shenzhen, china (Bao & Lu, 2020)</i>	metode campuran/ Niels Jørgen Christensen (1882): Teorinya tentang "eco-industrial parks" dapat memberikan wawasan tentang bagaimana menciptakan sistem produksi yang lebih berkelanjutan.	melaporkan pelajaran belajar dari Shenzhen, Cina, yang telah menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang menarik dalam beberapa dekade terakhir tetapi juga dipaksa untuk dengan cepat mengembangkan ekonomi sirkular limbah C&D yang efektif dari basis yang rendah.	Ditemukan bahwa keberhasilan Shenzhen dapat dikaitkan dengan (a) menerapkan intervensi pemerintah yang kuat; (b) mengembangkan pasar daur ulang limbah C & D yang berkembang pesat; (c) memperkenalkan teknologi daur ulang canggih; dan (d) memberlakukan pengaturan kelembagaan yang responsif. Perbaikan lebih lanjut terkait (1) sertifikasi produk daur ulang, (2) penggunaan lahan dan ekonomi

Tabel 1.8 merupakan beberapa penelitian tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian

tersebut yang mendukung peneliti melakukan studi literatur terkait “Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga Oleh Bank Sampah di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta”. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah di Indonesia maupun di Luar negeri masih kurang optimal sehingga masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menanggulangi kegiatan tersebut. Penelitian terdahulu dapat menggambarkan kondisi pengelolaan sampah yang ada. Selain itu dapat diketahui juga nilai kebaruan penelitian ini.

1.5.2 Administrasi Publik

Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri dari dua kata, yaitu *ad* dan *ministrate* yang memiliki arti *to server* dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud administrasi adalah suatu proses pelayanan dan pengaturan. Sedangkan publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Administrasi Negara adalah suatu “*spesies*” dalam lingkup “*genus*” administrasi yang bertujuan untuk menjadi kegiatan manusia yang kooperatif. (Richter et al., n.d.)

Beberapa ahli memberikan definisi pada administrasi publik di antaranya sebagai berikut :

- a. Pasolong (2017) menjelaskan bahwa secara konseptual, administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa

melaksanakan kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional. Dengan kata lain administrasi publik tidak hanya menyangkut persoalan administrasi aja, akan tetapi juga berbagai aspek lain dari kebutuhan kebijakan suatu lembaga publik seperti negara.

- b. Dimock (dalam Rodiyah dkk, 2021, hlm. 12) berpendapat bahwa administrasi public merupakan sebuah ilmu yang mempelajari apa yang menjadi suatu tujuan oleh rakyat melalui pemerintah dan sebagai cara mereka memperoleh hal-hal tersebut, dengan itu maka administrasi public tidak hanya datang dari sisi atas ke bawah melainkan dari sisi bawah ke atas pula.
- c. Ibrahim (2007) Administrasi Publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah (Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pelaksanaan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan terhadap sumberdaya manusia.
- d. Caiden dalam (Ariyani et al., 2016) Administrasi Publik adalah seluruh kegiatan administrasi public untuk segenap urusan publik (*public administration*) maka seluruh kegiatan yang bersangkutan pada urusan publik dapat disebut dengan administrasi publik.

1.5.2.1 Fungsi-fungsi Administrasi Publik

Tjokroamidjojo dalam Manurung (2010:112) menjelaskan bahwa ada tiga fungsi administrasi publik, yaitu :

- a. Formulasi Kebijakan

Fungsi formulasi kebijakan memiliki empat sub fungsi, yaitu analisis suatu kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun suatu langkah-langkah alternatif, penyusunan program atau strategi dan pengambilan keputusan. Konsistensi formulasi kebijakan amat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan masyarakat yang weather. Konsistensi tersebut terdapat konsistensi masalah waktu, antara tingkat pemerintahan dan antara unit pemerintahan.

b. Pengaturan Atau Pengendalian Unsur-Unsur Administrasi

Unsur-unsur administrasi yang perlu dikelola adalah organisasi, keuangan, kepegawaian, dan sarana-sarana lain. Tugas administrasi adalah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan keempat elemen tersebut. Pengaturan atau pengendalian unsur-unsur administrasi tidak lain adalah pengelolaan internal administrasi publik atau dapat juga dikatakan sebagai pengelolaan kapasitas administrasi publik. Membaiknya kapasitas administrasi publik diukur dari kemampuan merespon 12 perkembangan eksternal yang mencangkup perkembangan ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi dan perkembangan-perkembangan internasional

c. Penggunaan Dinamika Administrasi

Dinamika administrasi meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan dan komunikasi. Jadi suatu pengaturan atau pengendalian unsur-unsur administrasi lebih menekankan pada aspek organisasi dari administrasi publik, maka penggunaan dinamika administrasi menekankan pada aspek manajemen dari administrasi publik.

1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry menyusun Paradigma Administrasi Publik. Melalui pendekatan historis, paradigma administrasi publik kini telah mencapai paradigma keenam sejak era administrasi publik modern. Paradigma mutakhir adalah administrasi publik sebagai *governance*. Nicholas Henry (1985), memaparkan Lima paradigma administrasi publik yang dipetakan dalam upaya untuk menunjukkan bahwa gagasan administrasi publik sebagai sesuatu yang unik, sintesis lapangan yang relatif baru. Disiplin ilmu ini disusun sebagai suatu pencampuran dari teori organisasi, ilmu manajemen, dan konsep kepentingan umum. Kemudian menyarankan bahwa sudah waktunya administrasi publik membentuk dirinya sebagai kurikulum otonom di perguruan tinggi dan universitas dalam rangka mempertahankan relevansi dan kelayakan sosialnya.

Lima paradigma administrasi publik, yaitu:

a. Dikotomi Politik dan Administrasi, tahun 1990-1926

Paradigma 1, dikotomi politik dalam administrasi menekankan pada lokus dimana administrasi publik seharusnya diletakkan. Jelas, dalam pandangan Goodnow dan rekan-rekannya sesama pemerhati public administration, administrasi publik harus berpusat pada birokrasi pemerintah. Fokus bidang ini terbatas pada masalah-masalah- masalah organisasi dan penyusunan anggaran dalam birokrasi pemerintahan, politik dan kebijakan merupakan isi dari ilmu politik. Awal legitimasi konseptual lokus ini yang berpusat pada definisi lapangan, dan salah satu permasalahan

yang akan berkembang untuk akademisi dan praktisi yaitu masalah dikotomi ilmu politik dan ilmu administrasi

b. Prinsip- Prinsip Administrasi, tahun 1927-1937

Pada masa ini lokus administrasi publik kurang diperhatikan, sedangkan fokusnya adalah “prinsip-prinsip” manajerial yang dipandang berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan lingkungan budaya. 14 Perbedaan pendapat dari administrasi publik pada 1940-an salah satunya adalah keberatan bahwa politik dan pemerintahan tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kemudian yang lainnya adalah bahwa prinsip-prinsip administrasi secara logis tidak konsisten. Pada abad pertengahan, dua definisi pilar yaitu dikotomi politik/administrasi publik dan prinsip-prinsip administration telah digulingkan dan ditinggalkan oleh kaum intelektual yang kreatif di lapangan. Pengabaian ini meninggalkan administrasi publik dari epistemologi yang berbeda-identitas yang tidak jelas. Beberapa berpendapat bahwa suatu identitas belum dapat ditemukan. Hubungan konseptual yang logis antara Administrasi Publik dan Ilmu Politik yaitu, proses pembuatan kebijakan publik. Administrasi Publik menentukan isi “kotak hitam” pada proses itu: perumusan kebijakan publik dalam birokrasi publik dan menghubungkannya ke politik. Ilmu politik dianggap mempertimbangkan "Input Dan Output" dari proses itu: tekanan dalam politik menghasilkan perubahan politik dan sosial

c. Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik, tahun 1950-1970.

Definisi fase ketiga ini sebagian besar adalah usaha membangun kembali hubungan antara administrasi publik dan ilmu politik. Tapi konsekuensi dari usaha ini adalah untuk "mendefinisikan" bidang ilmu ini, setidaknya dalam hal fokus analisis, "keahlian" esensial. Dengan demikian, tulisan-tulisan tentang administrasi publik di tahun 1950-an berbicara tentang bidang ini sebagai "penekanan," sebuah "daerah kepentingan," atau bahkan sebagai "sinonim" ilmu politik. Administrasi publik kembali menjadi bagian dari ilmu politik. Pelaksanaan prinsip-prinsip administrasi sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor lingkungan, jadi tidak "*value free*" (bebas nilai). Pada tahun 1962, administrasi publik tidak dimasukkan sebagai Sub bidang ilmu politik dalam laporan Komite Ilmu Politik sebagai Disiplin Asosiasi Ilmu Politik Amerika.

d. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi, tahun 1956-1970

Pada masa ini Administrasi publik tetap menggunakan paradigma ilmu administrasi, dengan mengembangkan pemahaman sosial psikologi, dan analisis sistem sebagai pelengkap. Sebagai sebuah paradigma, ilmu administrasi memberikan fokus tapi tidak lokus. Menawarkan teknik yang membutuhkan keahlian dan spesialisasi, tetapi dalam pengaturan kelembagaan bahwa keahlian yang harus diterapkan tidak dapat didefinisikan. Sebagai Paradigma, administrasi adalah administrasi dimanapun temukan Fokus lebih difavoritkan daripada lokus.

e. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, tahun 1970- Sekarang

Kurangnya kemajuan dalam menggambarkan sebuah lokus untuk bidang ini, atau urusan publik apa dan "resep untuk kebijakan publik" harus mencakup hal yang relevan dengan administrator publik. Namun demikian, bidang ini tidak muncul untuk penekanan pada keunikan faktor-faktor sosial tertentu untuk sepenuhnya dikembangkan negara sebagai lokus yang tepat. Pilihan fenomena ini mungkin agak sewenang-wenang pada bagian dari administrator publik, tetapi mereka berbagi kesamaan sehingga mereka memiliki konsep lintas disiplin di universitas, membutuhkan kapasitas sintesis intelektual, dan bersandar ke arah tema yang mencerminkan kehidupan perkotaan, hubungan administrasi antar organisasi, dan menghubungkan teknologi dan nilai kemanusiaan, secara singkat disebut urusan publik. Sejak tahun 1970, tidak ada perkembangan paradigma baru dari administrasi publik.

f. Tata Kelola (1990-Sekarang)

Paradigma ini diketahui sejumlah kelompok masyarakat yang memiliki kewenangan secara langsung berdampak pada hubungan kelembagaan serta kemajuan perekonomian dan masyarakat, melalui pengesahan undang-undang dan penyebarannya. Konsep ini di perkenalkan dan di duplikasi pada tahun 1990-an untuk memenuhi syarat aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Secara lebih luas konsep Governance merupakan tata kelola yang dilakukan oleh antar bagian pemerintah untuk menjalankan sebuah proses pemerintah demi memajukan sebuah visi misi yang telah ditetapkan di dalam tujuan pembangunan.

Menurut penjelasan paradigma publik, penelitian ini menggunakan paradigma yang kelima yaitu Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik dikarenakan penelitian ini menggunakan fokus dan lokus yang jelas serta sesuai dengan penelitian ini. Fokus administrasi Publik yakni melihat implementasi kebijakan PERDA nomor 10 tahun 2012 penanganan sampah rumah tangga di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Sehingga menemukan faktor penghambat dalam menangani sampah nantinya dapat memberikan rekomendasi yang tepat dalam menangani sampah rumah tangga di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

1.5.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya memiliki banyak batasan-batasan atau definisi dalam literatur-literatur ilmu politik. Pada masing-masing definisi tersebut memberikan sebuah penekanan yang berbeda-beda, sebuah perbedaan ini timbul diakibatkan oleh masing-masing ahli memiliki latar belakang yang berbeda-beda di sisi lain pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut akan didefinisikan. Kebijakan publik merupakan kegiatan atau apapun yang dipilih pemerintah untuk dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, kebijakan publik harus mencakup semua aspek tidak hanya pada hal-hal yang diinginkan oleh pemerintah tetapi juga apa yang baik untuk sebuah negara (Thomas R Dye, 1975).

Dye dalam Harbani Pasolong (2008) mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang

jas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sedangkan menurut Carl Friedrich (Winarno 2007:17) mengemukakan bahwa, “Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.”

Namun dengan demikian harus diingat bahwa dalam mendefinisikan suatu kebijakan adalah bahwa pendefinisian kebijakan harus tetap memiliki pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dari pada apa yang telah diusulkan dalam suatu tindakan dalam persoalan tertentu. Kebijakan publik akan lebih tepat jika didefinisikan bila mencakup arah tindakan atau apa yang dilakukan dan semata-mata menyangkut usulan tindakan. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Winarno (2014) “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu persoalan”. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksud oleh pemerintah.

Effendi (dalam Syafiie (2006: 106)) mengemukakan bahwa pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai: “Pengetahuan

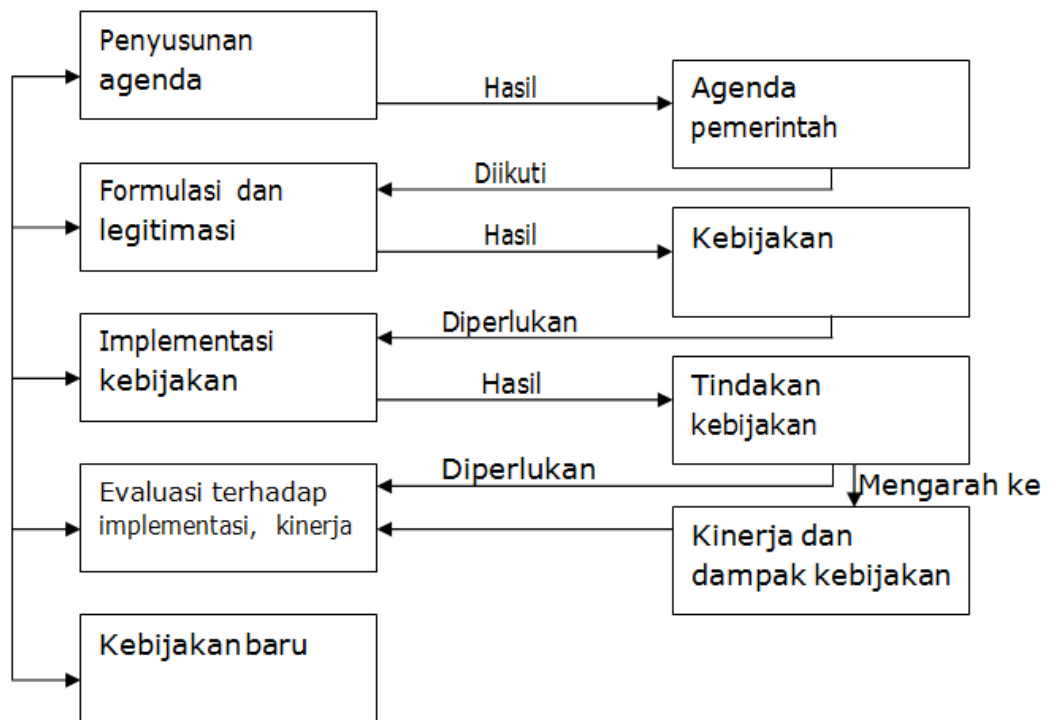
tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijakan.”

Berdasarkan definisi di atas dapat dilihat bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah maupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau suatu problem yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya disebabkan oleh adanya tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan-tindakan untuk masyarakat. Penelitian ini akan meninjau implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

1.5.4 Proses Kebijakan Publik

Menurut William Dunn (1994) Proses kebijakan publik berlangsung sebagai sebuah siklus pengembangan kebijakan yang dimulai dari pengaturan agenda dengan penetapan atau pendefinisian masalah publik hingga proses evaluasi atau penilaian kebijakan. Untuk lebih jelasnya,

berikut adalah penjelasan proses kebijakan publik menurut William Dunn (1994).



Gambar 1.3 Proses Kebijakan Menurut William Dunn (1994)

Sumber : Jurnal Analisis Kebijakan Versi Willam Dunn (1994)

1) Penyusunan Agenda

Sebagai respon terhadap permasalahan publik, mesin legislatif dan birokrasi pemerintah dapat bergerak dan terlibat dalam proses formulasi, adopsi, dan implementasi kebijakan termasuk turut berperan untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses penyusunan kebijakan. Keterlibatan aktor, elite atau pemangku kepentingan dapat terus berlanjut pada tahap analisis efektivitas kebijakan, untuk menunjukkan kekurangan dalam formulasi maupun implementasi sehingga dapat menjadi usulan agenda baru kebijakan. Oleh

karena itu, pembuatan agenda menempati urutan pertama dalam siklus pengembangan kebijakan.

2) Formulasi Kebijakan

Proses formulasi kebijakan publik secara umum memiliki tahapan-tahapan diantaranya yaitu: pengaturan proses pengembangan kebijakan, penggambaran permasalahan, penetapan sasaran dan tujuan, penetapan prioritas, perancangan kebijakan, penggambaran pilihan-pilihan, penilaian pilihan-pilihan, “perputaran” untuk penelaahan sejawat dan revisi kebijakan, serta akhirnya upaya untuk mendapatkan dukungan formal terhadap kebijakan yang sedang diajukan atau disusun.

3) Adopsian Kebijakan

Setelah formulasi kebijakan, tahap berikutnya adalah adopsi kebijakan yaitu sebuah proses untuk secara formal mengambil atau mengadopsi alternatif solusi kebijakan yang ditetapkan sebagai sebuah regulasi atau produk kebijakan yang selanjutnya akan dilaksanakan. Pengadopsian kebijakan sangat ditentukan oleh rekomendasi yang antara lain berisikan informasi mengenai manfaat dan berbagai dampak yang mungkin terjadi dari berbagai alternatif kebijakan yang telah disusun dan akan diimplementasikan.

4) Implementasi Kebijakan

Pengimplementasian merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Definisi implementasi menurut William Dunn (1994)

adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Ada dua alternatif yaitu dalam implementasi kebijakan mengimplementasikan dalam bentuk program atau membuat kebijakan turunannya. Kesiapan implementasi amat menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah kebijakan. Penyusunan kebijakan berbasis data atau bukti juga berpengaruh besar terhadap sukses tidaknya implementasi kebijakan.

5) Evaluasi/Penilaian Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap keseluruhan tahapan dalam siklus kebijakan, utamanya ketika sebuah kebijakan yang disusun telah selesai diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah kebijakan telah sukses mencapai tujuannya dan menilai sejauh mana keefektifan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak berkepentingan.

Menurut proses kebijakan publik penelitian implementasi kebijakan dalam penanganan sampah akan menggunakan proses kebijakan pengimplementasian kebijakan. Ada dua alternatif yang digunakan dalam proses ini yaitu implementasi dalam bentuk program ataupun dalam membuat kebijakan turunan yang memperkuat kebijakan sebelumnya. Implementasi sangat menentukan bagaimana efektivitas dan keberhasilan dalam kebijakan tersebut.

1.5.5 Pendekatan Kebijakan Publik

1.5.5.1. Pendekatan Top-Down

Menurut DeLeon (2001,2) Pendekatan *top-down* dalam penerapannya suatu program melibatkan pengambilan keputusan tersebut dibuat oleh aktor-aktor pusat. Metode ini mengacu pada sejauh mana tindakan administrator dan birokrat selaras dengan prosedur dan tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan tingkat pusat. Implementasi kebijakan menggunakan metode *top-down* dimana kebijakan yang diluncurkan secara terpusat dilaksanakan oleh aktor pusat. Strategi ini melibatkan penyelarasan kegiatan yang dilakukan oleh aktor atau pelaksana (administrator dan birokrat) dengan prosedur dan tujuan yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan tingkat pusat.

1.5.5.2 Pendekatan Bottom-Up

DeLeon (2001,2) pendekatan *Bottom-Up* menyatakan bahwa implementasi kebijakan berasal dari keputusan yang dibuat oleh individu di tingkat akar rumput, khususnya masyarakat, yang mengidentifikasi permasalahannya. menyatakan bahwa teknik pelaksanaan yang mendasar dilakukan di tingkat masyarakat. Kebijakan sesuai dengan keadaan sosial, budaya, dan kemasyarakatan individu saat ini untuk mencegah kebijakan tersebut menjadi tidak efektif di masa depan.

Menurut penjelasan di atas, penelitian menggunakan pendekatan *top-down* karena pemerintah Kota Yogyakarta sebagai regulator menerbitkan Perda Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh administrator level bawahnya untuk meningkatkan keefektifan penanganan sampah rumah tangga, kebijakan dirumuskan oleh administrator atau birokrat di tingkat bawah.

1.5.6 Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi melibatkan proses pengumpulan sumber daya tambahan untuk menilai tindakan apa yang diperlukan. Ini berfungsi sebagai fase dalam kebijakan yang menuntut minimal dua langkah yang berbeda namun terkait. Langkah pertama adalah perumusan langkah-langkah yang diperlukan, sedangkan langkah kedua melibatkan penerapan langkah-langkah yang dirumuskan tersebut. Mazmanian dan Sabatier (1983 : 4) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa "memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan dan mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian". Definisi ini menekankan bahwa fokusnya melampaui sekadar tindakan badan administrasi yang bertugas melaksanakan program dan memastikan kepatuhan di antara kelompok sasaran. Ini juga mencakup jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi perilaku semua pemangku kepentingan, yang mengarah pada hasil yang diantisipasi dan tidak terduga. (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended*) dari program.

Van Meter dan Van Horn 1975 (dalam Wahab, 2002 : 65) merumuskan proses implementasi sebagai "*those actions by public or private individuals (or groups) that, are directed at the achievement of*

objectives set forth in prior policy decisions" (Kegiatan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, serta organisasi publik atau swasta, untuk mencapai tujuan yang diuraikan dalam keputusan kebijakan).

keberhasilan implementasi kebijakan publik, yang merupakan tujuan utama, persiapan yang matang sangat penting. Kebutuhan ini muncul dari fakta bahwa pelaksanaan kebijakan publik adalah bidang studi penting dalam penelitian kebijakan publik. "*crucial*" pada proses kebijakan publik menurut Edwards III (1980:1) bersifat *crucial* disebabkan oleh suatu kebijakan publik, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan. Jika kebijakan publik tidak disiapkan dan direncanakan secara efektif, tujuannya tidak mungkin terpenuhi. Di sisi lain, bahkan implementasi yang paling direncanakan dan dipersiapkan dengan cermat pun akan gagal jika kebijakan itu sendiri tidak dirumuskan dengan benar. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan publik tercapai, baik perumusan maupun implementasinya harus terstruktur dengan cermat dan terencana dengan baik.

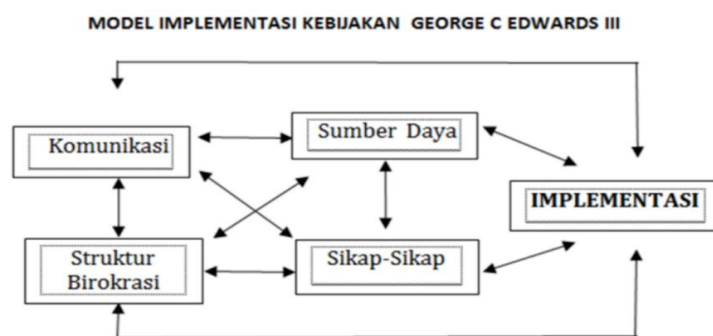
2. Model Implementasi Kebijakan

Berbagai model untuk menerapkan kebijakan telah disarankan oleh pakar kebijakan publik seperti George Edward III, Grindle, William Dan, Van Meter, dan Van Horn, bersama dengan Sabatier dan beberapa lainnya. Namun demikian, penting untuk tidak mengabaikan perspektif ahli

tambahan ketika berusaha menganalisis implementasi kebijakan secara lebih menyeluruh dan komprehensif.

a. Model Implementasi Kebijakan Publik George Edward III (1820)

Model implementasi George C. Edwards III (1820) menekankan pentingnya menyelaraskan konten kebijakan dengan konteksnya. Artinya, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan keadaan tertentu, termasuk sumber daya manusia yang dituju, persepsi dan tanggapan mereka yang terlibat, serta sikap dan reaksi birokrat. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk menerapkan kebijakan yang ada secara efektif untuk mencapai hasil yang optimal. Tujuan akhir dari proses implementasi ini adalah tujuan menyeluruh yang diperjuangkan oleh pengambil keputusan, dan prasyarat mendasar untuk keberhasilan eksekusi kebijakan adalah bahwa pengambil keputusan jelas tentang tanggung jawab mereka. Model Edwards menunjukkan bahwa kemandirian proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Siregar, N. (2022).



Gambar 1.3 Model Implementasi Kebijakan George C Edwards III (1820)

Sumber : Nurmayana Siregar, 2022, Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka)

b. Model implementasi kebijakan menurut Grindle (1980)

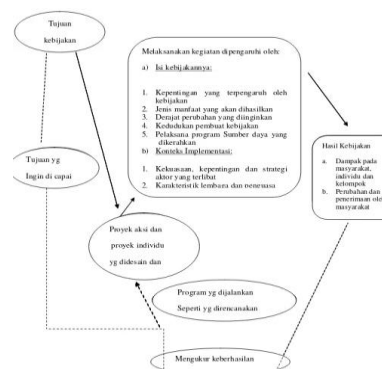
Menurut Grindle (1980: 11), keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal:

a. Dari sudut pandang proses. Dengan menanyakan apakah implementasi kebijakan tersebut sejalan dengan apa yang telah direncanakan dalam hal kebijakan.

b. Apakah tujuan politik akan tercapai. Dimensi ini diukur dengan mempertimbangkan dua faktor, yaitu:

1) Efek atau konsekuensi bagi masyarakat, individu dan kelompok

2) Tingkat perubahan yang terjadi dan penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang telah terjadi. Selanjutnya dijelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh tingkat kelayakan kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari: isi kebijakan dan konteks implementasi dalam konteks perumusan kebijakan. Siregar, N. (2022)



Gambar 1.4 Model Implementasi Kebijakan Grindle (1980)

Sumber : Nurmayana Siregar, 2022, Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka)

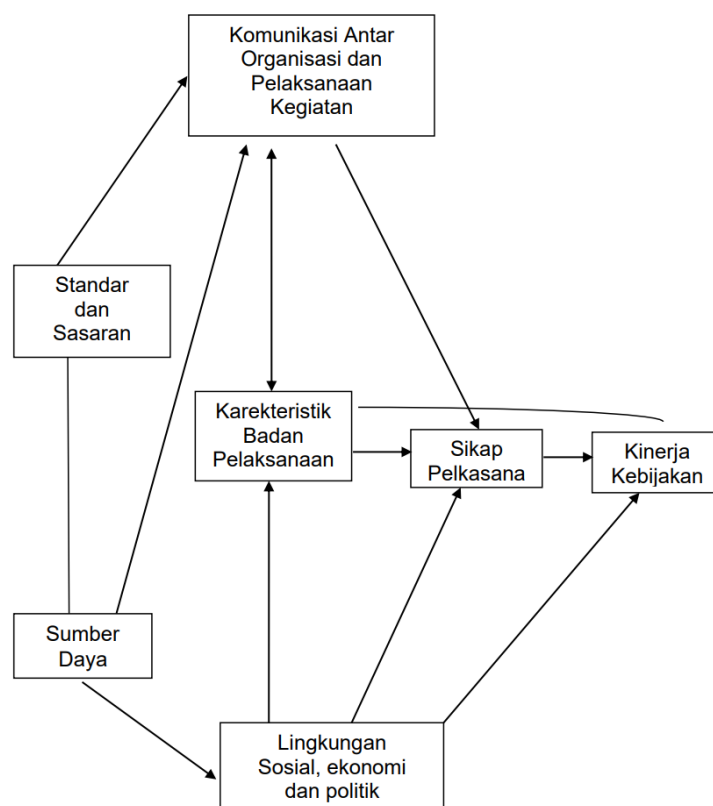
c. Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975)

Van Meter dan Van Horn (1975) (dikutip Subarsono, 2005: 99 dan Winarno, 2002: 109) merumuskan model implementasi kebijakan yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

- a) Standar dan Sasaran Kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas, sehingga dapat direalisasi. Bila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
- b) Sumber Daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun non manusia.
- c) Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d) Karakteristik Badan Pelaksana. Karakteristik badan pelaksana tidak bisa lepas dari struktur birokrasi yang diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang mempunyai hubungan potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Beberapa unsur yang berpengaruh terhadap organisasi dalam

mengimplementasikan kebijakan, antara lain: kompetensi dan ukuran staf, tingkat pengawasan, vitalitas suatu organisasi, kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

- e) Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada



Gambar 1.4 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975)

Sumber : Nurmayana Siregar, 2022, Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka)

Menurut model di atas dapat dilihat bahwa model yang relevan untuk penelitian ini menggunakan model Van Meter Dan Van Horn sudah dijelaskan pada model di atas Van Meter Van Horn memiliki enam variabel dalam implementasi kebijakan, maka dari itu dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas implementasi kebijakan pada perda nomor 10 tahun 2012 dalam penanganan sampah rumah tangga di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

1.5.5 Penanganan Sampah

Penanganan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah tertuang dalam pasal 15 Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta.

Timbunan sampah akan berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan. Pencemaran air, udara dan tanah yang berakibat keberadaan sampah menurunkan kualitas lingkungan (Selomo et al., n.d.). Jika sampah tidak ditangani dengan baik maka berkonsekuensi pada mahalanya biaya pengelolaan lingkungan serta kerugian secara ekonomi berupa terhambatnya perkembangan sektor pariwisata. akan berdampak serius karena sebagian besar daerah di Kota Yogyakarta adalah tempat wisata dan mata pencaharian warga di Kota Yogyakarta banyak yang mengandalkan sektor pariwisata. Akan mengurangi nilai estetika jika banyak timbunan sampah yang tidak bisa ditangani dengan maksimal.

Penelitian ini berdasarkan peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah khususnya tentang penanganan sampah rumah tangga yang tertuang pada pasal 15 sampai dengan 20. penanganan sampah rumah tangga dan jenis sampah rumah tangga dilakukan dengan cara:

A. Pemilahan Sampah Rumah Tangga

Metode penanganan sampah yang paling efektif saat ini adalah pemisahan sampah sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah organik, anorganik dan residu, yang diperlukan pendekatan yang berbeda. Hal ini erat kaitannya dengan paradigma baru pengelolaan sampah, yang tidak lagi melihat sampah semata-mata sebagai hasil aktivitas manusia dalam bentuk sampah setelah pemanfaatan sumber daya. (Intan Paradita, 2018)

B. Pengumpulan Sampah Rumah Tangga

Permasalahan utama pengelolaan sampah di Indonesia terjadi pada saat sampah diangkut dari rumah tangga ke tempat pengumpulan sampah. Pada tingkat rumah tangga upaya pemisahan sampah sudah mulai dilakukan, walaupun belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi pada saat sampah diangkut ke tempat pengumpulan akhir, seringkali sampah dicampurkan kembali, karena armada pengangkutnya tidak membedakan sampah berdasarkan jenis/bahannya (Ismail, 2019)

Pengumpulan sampah di lokasi penelitian adalah pola individu yang tidak langsung dimana petugas kebersihan mengumpulkan sampah dari rumah – rumah menggunakan alat pengumpul yang selanjutnya dipindahkan menuju ke bank sampah.

C. Pengangkutan Sampah Rumah Tangga

Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Pengangkutan sampah merupakan salah satu komponen penting dan membutuhkan perhitungan yang cukup teliti, dengan sasaran mengoptimalkan waktu angkut yang diperlukan dalam sistem tersebut.

D. Pengolahan Sampah Rumah Tangga

Pengolahan sampah rumah tangga adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengurangi, mengelola, dan memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkan di rumah tangga. Para ahli lingkungan dan pengelolaan sampah sepakat bahwa pemilahan sampah sejak awal merupakan langkah yang sangat krusial. Dengan memilah sampah menjadi organik dan anorganik, kita memudahkan proses pengolahan selanjutnya. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk menyuburkan tanaman, sedangkan sampah anorganik seperti kertas, plastik, dan logam dapat didaur ulang menjadi produk baru. Selain itu, pengurangan produksi sampah dari sumbernya juga sangat penting. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memilih produk yang ramah lingkungan, dan mengadopsi gaya hidup minim sampah. Teknologi juga berperan penting dalam pengolahan sampah, seperti mesin pencacah sampah organik, mesin

pemilah sampah otomatis, dan teknologi pengolahan sampah bertenaga surya.

E. Pemrosesan Akhir Sampah

Pemrosesan akhir sampah merupakan tahap terakhir dalam pengelolaan sampah setelah melalui proses pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan awal. Pada tahap ini, sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali akan dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA). TPA Piyungan di Kota Yogyakarta menggunakan metode pengolahan limbah terpadu untuk mengurangi dampak lingkungan dan kesehatan. Prosesnya dimulai dengan penerimaan dan pemisahan limbah berdasarkan jenis (organik, non-organik dan B3). Limbah organik diolah menjadi kompos menggunakan proses aerobik, sedangkan limbah non-organik dipadatkan dan dikubur. Limbah B3 diolah dengan teknologi khusus. Setelah TPA penuh, dilakukan penutupan TPA secara permanen untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan memulihkan lahan bekas TPA.

Penanganan sampah dilakukan sebagai upaya dalam penanganan dampak buruk terhadap lingkungan dan manusia. Sampah jika tidak segera dikelola, akan menjadi tempat berkembang biak organisme penyebab penyakit dan menyebabkan gangguan keseimbangan lingkungan. Penanganan harus dilakukan seiring dengan bertambahnya penduduk dan aktivitas konsumsi manusia yang bervariasi. Dari lima tahapan di atas yang dikelola oleh bank sampah hanya penanganan sampah pada tahap pemilahan, pengumpulan dan pengolahan. Adapun

alasan nya dua tahapan pengangkutan dan proses akhir tidak dikelola oleh bank sampah.

1.6 Kerangka Teori



Sumber: Diolah Penulis (2024)



1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga Oleh

Bank Sampah

Implementasi kebijakan penanganan sampah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan penanganan sampah rumah tangga di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Dapat dilihat dari gejala ;

1. Tujuan Kebijakan

Tujuan Kebijakan PERDA No 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta pada pasal 5 ayat 2 yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan lestari serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, gejala yang akan diteliti adalah:

- a. Terwujudnya lingkungan yang bersih dengan penanganan sampah yang baik akan mewujudkan lingkungan yang bersih dan asri sehingga meningkatkan nilai kenyamanan di Kecamatan Gondokusuman (aktif atau tidaknya bank sampah)
- b. Terwujudnya lingkungan yang sehat dengan penanganan sampah yang baik akan menjadikan lingkungan sekitar jauh dari kuman dan sumber penyakit. (apakah sudah melakukan pemilahan sampah atau belum)
- c. Terwujudnya lingkungan yang lestari bagaimana lingkungan alam dapat menjalankan fungsinya dengan alami dan mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. (tinggi atau rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dengan lingkungan sekitar)

- d. Meningkatkan kualitas hidup dengan pengelolaan sampah yang baik maka memberi dampak yang positif pada berbagai aspek kehidupan, penurunan angka kejadian penyakit. (bagaimana pengurangan jumlah timbunan sampah pada masyarakat apakah sudah berkurang atau belum)

2. Sumber daya

Sumber daya adalah Sumber daya manusia, fasilitas pendukung dan sumber dana dalam implementasi kebijakan penanganan sampah rumah tangga oleh bank sampah (tahap pemilahan, pengumpulan dan pengolahan) Dengan gejala yang akan diteliti;

- a. Sumber daya manusia dalah pengurus, anggota dan masyarakat bank sampah yang terlibat dalam penanganan sampah rumah tangga.
- b. Peran Sumber daya manusia (pengurus, anggota dan masyarakat) dalam penanganan sampah rumah tangga.
- c. Fasilitas pendukung dalam penanganan sampah rumah tangga.
- d. Tersedianya Sumber dana dalam penanganan sampah rumah tangga.

3. Komunikasi

Komunikasi adalah bagaimana cara dinas Lingkungan Hidup memberikan arahan atau sosialisasi supaya tidak menimbulkan perbedaan pendapat dalam hal pelaksanaan penanganan sampah. Gejala yang akan diteliti adalah:

- a. Transmisi, adalah ada tidaknya sosialisasi dalam penanganan sampah oleh DLH.

- b. Kejelasan adalah upaya yang dilakukan dinas dalam mendukung keberhasilan kebijakan penanganan sampah oleh bank sampah. (ada tidaknya kegiatan pelatihan)
- c. Konsistensi adalah cara DLH dalam meng koordinasikan implementasi kebijakan ke pengurus, anggota, masyarakat supaya tetap sesuai dengan tujuan

4. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah kondisi yang mempengaruhi sikap masyarakat untuk bertindak dalam implementasi kebijakan penanganan sampah.. gejala yang akan diteliti;

- a. Lingkungan Sosial adalah kebiasaan masyarakat dalam penanganan sampah apakah sudah menerapkan 3R atau kurang peduli terhadap penanganan sampah.
- b. Lingkungan Ekonomi adalah tingkat ekonomi masyarakat dalam penanganan sampah, pada kondisi ini dapat dilihat apakah kaitan terkait ekonomi mempengaruhi produksi sampah.
- c. Lingkungan Politik adalah bagaimana tingkat dukungan dari DLH tentang penanganan sampah di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

1.7.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah

Rumah Tangga

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor kesadaran SDM (Pengurus dan anggota bank sampah serta masyarakat) dilihat dari kesadaran mereka dalam penanganan sampah

- a. Sumber daya Manusia adalah kesadaran masyarakat pada penanganan sampah
- b. Lingkungan Ekonomi adalah lingkungan dimana dilihat dari tingkatan ekonomi masyarakat dalam berpartisipasi atau terlibat menangani sampah.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berkaitan dengan fasilitas, lingkungan sosial dan koordinasi antara masyarakat yang terlibat dalam implementasi dalam penanganan sampah. Gejala yang akan diteliti adalah :

- a. Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas pendukung yang tersedia.
- b. Lingkungan Sosial adalah perilaku masyarakat dalam mendukung atau tidaknya terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan sampah.
- c. Koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi pengurus, anggota bank sampah dan masyarakat.

Tabel 1.9 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Indikator	Sub Fenomena	Gejala yang diamati	Informan
Implementasi Kebijakan penanganan sampah oleh bank sampah di	Tujuan Kebijakan penanganan sampah oleh bank sampah	a. Lingkungan Bersih	a. aktif atau tidaknya bank sampah b. bebas dari sampah	– Pengurus / Anggota bank sampah – Masyarakat

Fenomena	Indikator	Sub Fenomena	Gejala yang diamati	Informan
Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta		b. Lingkungan Sehat	a. Tidak adanya genangan air b. Ada pemilahan sampah di tingkat rumah tangga c. Wilayah rendah masyarakat sakit d. Terdapat biopori setiap rumah	– Pengurus / Anggota bank sampah – Masyarakat
		c. Lingkungan lestari	a. Penghijauan yang baik b. Apotik atau tanaman toga c. Ruang terbuka hijau	– Pengurus / Anggota bank sampah – Masyarakat –
		d. Kualitas hidup masyarakat	a. Pemilahan sampah b. Kesehatan masyarakat	– Pengurus / Anggota bank sampah – Masyarakat
	Sumber daya	a. Sumber daya manusia	a. pengurus, anggota dan masyarakat bank sampah yang terlibat dalam penanganan sampah rumah tangga. b. Peran Sumber daya manusia (pengurus, anggota dan masyarakat) dalam penanganan sampah rumah tangga.	– Pengurus / Anggota bank sampah – Masyarakat
	—	b. Fasilitas	a. Fasilitas pendukung dalam penanganan sampah rumah tangga.	— Dinas Lingkungan Hidup — Kecamatan — Pengurus / Anggota bank sampah — Masyarakat
		c. sumber dana	a. Tersedianya Sumber dana dalam penanganan sampah rumah tangga.	– Dinas Lingkungan Hidup – Kecamatan – Pengurus / Anggota bank sampah – Masyarakat

Fenomena	Indikator	Sub Fenomena	Gejala yang diamati	Informan
	Komunikasi	a. Transmisi	a. ada tidaknya sosialisasi dalam penanganan sampah oleh DLH.	— Dinas Lingkungan Hidup — Kecamatan — Pengurus / Anggota bank sampah — Masyarakat
		b. Kejelasan	b. Adanya pelatihan guna mendukung terselenggaranya penanganan sampah	— Dinas Lingkungan Hidup — Kecamatan — Pengurus / Anggota bank sampah
		c. Konsistensi	c. cara DLH dalam meng koordinasikan implementasi kebijakan ke pengurus, anggota, masyarakat supaya tetap sesuai dengan tujuan	— Dinas Lingkungan Hidup — Kecamatan — Pengurus / Anggota bank sampah — Masyarakat
	Lingkungan	a. Lingkungan Sosial	a. kebiasaan masyarakat dalam penanganan sampah apakah sudah menerapkan 3R atau kurang peduli terhadap penanganan sampah.	— Dinas Lingkungan Hidup — Kecamatan — Pengurus / Anggota bank sampah — Masyarakat
		b. Lingkungan Ekonomi	a. tingkat ekonomi masyarakat dalam penanganan sampah, pada kondisi ini dapat dilihat apakah kaitan terkait ekonomi mempengaruhi produksi sampah.	— Kecamatan — Pengurus / Anggota bank sampah — Masyarakat
		c. Politik	a. bagaimana tingkat dukungan dari DLH tentang penanganan sampah di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.	— Dinas Lingkungan Hidup — Kecamatan

Fenomena	Indikator	Sub Fenomena	Gejala yang diamati	Informan
Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga Oleh Bank Sampah	Faktor Internal	a. Sumber daya	a. kesadaran masyarakat pada penanganan sampah	- Dinas Lingkungan Hidup - Kecamatan - Pengurus / Anggota bank sampah - Masyarakat
		b. Lingkungan Ekonomi	a. lingkungan dimana dilihat dari tingkatan ekonomi masyarakat dalam berpartisipasi atau terlibat menangani sampah.	- Dinas Lingkungan Hidup - Kecamatan - Pengurus / Anggota bank sampah - Masyarakat
	Faktor Eksternal	a. Fasilitas	a. fasilitas pendukung yang tersedia	- Dinas Lingkungan Hidup - Kecamatan - Pengurus / Anggota bank sampah - Masyarakat
		b. Lingkungan Sosial	a. perilaku masyarakat dalam mendukung atau tidaknya terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan sampah.	- Dinas Lingkungan Hidup - Kecamatan - Pengurus / Anggota bank sampah - Masyarakat
		c. Koordinasi	a. koordinasi pengurus, anggota bank sampah dan masyarakat.	- Kecamatan - Pengurus / Anggota bank sampah - Masyarakat

Sumber : Diolah oleh penulis (2024)

1.8 Argumen Penelitian

Dalam penelitian ini, Implementasi memiliki peran penting agar suatu kebijakan berjalan dengan baik. Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan mengimplementasi kebijakan pengelolaan sampah terus berjalan dengan optimal terus berjalan. Dalam upaya implementasi kebijakan pengelolaan sampah kota Yogyakarta dalam menganalisis berbagai aspek dalam kehidupan seperti komunikasi, lingkungan sosial ekonomi, sumberdaya, ukuran kebijakan, sikap agen pelaksana. Hal Tersebut menjadi upaya dalam merumuskan strategi

dalam upaya memaksimalkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga, maka dari itu perlunya peninjauan dengan melakukan penilaian implementasi suatu kebijakan menurut Menurut Van Meter dan Van Horn 1975 (Maranda, 2020).

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Mempertimbangkan tujuan penelitian yang terkait dengan topik yang diteliti, pendekatan yang diambil dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Jenis penelitian ini dicirikan oleh sifat naturalistiknya, karena melibatkan analisis fenomena yang terjadi dalam pengaturan dunia nyata. Dalam penelitian kualitatif, sumber data dipilih secara acak dan sesuai dengan metode snowball sampling, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data melalui triangulasi. Metodologi kualitatif berusaha untuk memahami dan menafsirkan pentingnya peristiwa berdasarkan interaksi manusia dalam konteks tertentu dari sudut pandang peneliti. Pada akhirnya, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek yang akan diteliti.

Menurut Soegianto, tujuan dari penelitian kualitatif adalah memberikan penjelasan menyeluruh tentang suatu fenomena dengan mengumpulkan data yang luas, menyoroti pentingnya kedalaman dan detail dalam data yang dianalisis. Dalam penelitian kualitatif, memiliki data yang lebih mendalam, komprehensif, dan terperinci meningkatkan kualitas penelitian. Mengenai jumlah responden atau subjek penelitian, metode penelitian kualitatif biasanya melibatkan lebih sedikit

subjek dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, karena mereka memprioritaskan kekayaan data daripada volume yang banyak.

Penelitian kualitatif semacam ini berbentuk studi kasus, yang menawarkan eksplorasi yang komprehensif dan terperinci dari satu atau lebih subjek. Kasus yang diperiksa dapat melibatkan seseorang, keluarga, peristiwa, atau kelompok kecil lainnya, memungkinkan peneliti untuk mengamati, memahami, dan memahami bagaimana subjek beroperasi atau berfungsi dalam konteks alami yang asli.

Stake (dalam Denzin, 1994) mengemukakan tiga tipe penelitian kasus , yaitu :

- (1) studi kasus intrinsik (intrinsic case studies);
- (2) studi kasus instrumental (instrumental case studies);
- (3) studi kasus kolektif (collective case studies)

Implementasi kebijakan penanganan sampah oleh bank sampah di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, menggunakan Studi Kasus Intrinsik. Studi ini fokus pada pemahaman mendalam tentang kasus tertentu, yaitu bagaimana bank sampah tersebut mengimplementasikan kebijakan penanganan sampah. Tujuannya adalah memahami fenomena atau kejadian secara detail, seperti proses implementasi, faktor penghambat.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Sampah Kecatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Penelitian ini mengambil tentang “Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga oleh Bank Sampah di Kecamatan

Gondokusuman Kota Yogyakarta” Sebagaimana tentang pengelolaan sampah rumah tangga adalah masalah kompleks yang tidak hanya mencakup tantangan teknis tetapi juga faktor kelembagaan, dukungan keuangan, dukungan dari pemerintah daerah, dan keterlibatan masyarakat.

1.9.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian deskriptif kualitatif informan dalam penelitian ini terdapat 4 informan yaitu masyarakat Kota Yogyakarta, Pengelola Bank Sampah, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, serta Kecamatan Gondokusuman. Studi ini menggunakan metode pengambilan sampel yang ditargetkan, yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, seperti pemahaman tentang masalah yang dihadapi, akses ke data, dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang tepat terhadap pertanyaan. Sampel bertujuan yakni sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Metode pengambilan sampel ini disebut sebagai pengambilan sampel yang ditargetkan. Dalam kasus seperti itu, peneliti biasanya memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan luas tentang informasi dan masalah yang dihadapi dan yang dapat dianggap sebagai sumber data yang dapat diandalkan dan matang. Selama proses pengumpulan data, pemilihan informan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. (Patton, 1986:35)

Pada penelitian ini juga menggunakan cara pengambilan sampel *Snowball Sampling* pada sampel ini digunakan jika kurangnya mengetahui kondisi warga masyarakat di lapangan. Terdapat kemungkinan jika jika peneliti hanya memiliki jumlah yang terbatas. Pada hal ini peneliti dapat bertanya kepada informan pertama yang mungkin mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

1.9.4 Jenis Data

Pada penelitian ini data yang digunakan bersifat kualitatif, menunjukkan bahwa informasi yang dikumpulkan melalui wawancara terdiri dari kata-kata tertulis, foto lapangan, dan data numerik dalam jumlah terbatas. Dalam penelitian ini, data kualitatif disajikan dalam bentuk ekspresi verbal, kalimat, diagram, dan gambar. (Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h.). Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini berupa teks atau kata-kata tertulis, serta peristiwa dalam kehidupan sosial.

1.9.5 Sumber Data

Dalam jenis data menurut cara dan metode perolehannya dibagi menjadi dua :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data tanpa perantara tertentu. Data primer diperoleh melalui wawancara, pendapat orang lain, kuesioner, observasi dan diskusi kelompok terfokus. Pada sumber data primer dalam penelitian ini didapat dengan cara wawancara terhadap masyarakat di Kota Yogyakarta, pengelola bank sampah, Kecamatan Gondokusuman, serta *stakeholder* terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Umumnya, data sekunder diperoleh melalui publikasi

atau publikasi resmi, termasuk data yang digunakan sebagai literatur seperti buku dan laporan.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi kuantitatif berbeda dengan observasi kualitatif (Hasanah, n.d.). Observasi kuantitatif berfungsi untuk tujuan standardisasi dan kontrol, sedangkan pengamatan kualitatif berakar pada naturalisme. Pengamatan kualitatif terjadi dalam kerangka peristiwa alam dan mengikuti perkembangan organik kehidupan seperti yang diamati. Tidak seperti metode kuantitatif, pengamatan kualitatif tidak dibatasi oleh kategori pengukuran dan respons yang telah ditentukan sebelumnya.

Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung mengenai gejala dan masalah yang ingin diselidiki oleh para peneliti. Peneliti melakukan pengamatan dengan meneliti pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Mereka juga menganalisis berbagai faktor yang menjadi kekuatan pendorong dan hambatan dalam pengoperasian kegiatan bank sampah.

b. Teknik Wawancara

Wawancara melibatkan proses komunikasi dan interaksi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi melalui format tanya jawab antara peneliti dan informan, atau mengenai topik minat yang ditentukan

oleh peneliti. Dengan bantuan teknologi informasi pada saat ini wawancara dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka yaitu dengan menggunakan media telekomunikasi. Pada dasarnya, wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mendalam mengenai pertanyaan atau topik yang sedang diselidiki dalam penelitian. Mereka juga berfungsi sebagai sarana untuk memverifikasi informasi.

Melalui teknik wawancara ini, peneliti menggali informasi terperinci mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta berfungsi sebagai faktor yang mendorong dan menghambat kegiatan pemberdayaan ini di masyarakat dengan *interview guide*. Peneliti memilih informasi sesuai dengan data yang peneliti butuhkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peneliti yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan, peraturan, kebijakan, Dokumentasi berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, bagan dan sebagainya. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dalam hal ini penelitian menggunakan dokumen berupa catatan, rekaman suara, foto, dari informan.

1.9.7 Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data dikumpulkan. Miles dan Huberman (Uin & Banjarmasin, 2018) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis dan interpretasi data kualitatif pada penelitian ini sesuai dengan teori Miles dan Huberman meliputi proses *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification* (penarikan kesimpulan).

1. Kondesasi data (*Data Condensation*), merupakan tahapan merangkum dengan memilih poin-poin penting dan menekankan aspek yang paling signifikan. Pendekatan ini menghasilkan kumpulan data yang lebih ringkas yang memberikan gambaran yang lebih jelas, memfasilitasi peneliti dalam mengumpulkan informasi tambahan dan menemukannya secara efisien bila diperlukan.
2. Penyajian data (*Data Display*), merupakan tahapan untuk Susunan data yang sistematis dicapai melalui kategorisasi selama fase pengurangan data. Data diatur secara terstruktur dengan menawarkan konteks dan narasi, yang berfungsi sebagai dasar untuk membangun argumen.
3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*), merupakan penarikan kesimpulan data disusun secara sistematis melalui kategorisasi selama fase reduksi data. Itu disusun secara efektif dengan menyediakan konteks dan narasi yang membentuk dasar untuk argumentasi. Simpulan, Dari penjelasan terdahulu, Deskripsi ini mengarah pada kesimpulan bahwa pengumpulan data saling berhubungan dengan analisis data. Akibatnya, dalam penelitian kualitatif,

analisis data dimulai dengan pengumpulan data. Untuk memfasilitasi pengurangan data, upaya dilakukan untuk mengumpulkan data dan kemudian mengaturnya ke dalam unit istilah tertentu, kategori yang berbeda, dan topik tertentu.